



Penerapan E-Government Pada Layanan Informasi Melalui Website Open Palement di Indonesian Parliamentary Center (IPC)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Salsabila Rahmadina Universitas Muhammadiyah Jakarta rahmadinas376@gmail.com Choris Satun Nikmah Indonesian Parliamentary Center chorissatunnikmah@gmail.com Abdul Rahman Universitas Muhammadiyah Jakarta abdul.rahman@umj.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rahmadina, S., Nikmah, C. S., & Rahman, A. (2024). Penerapan E-Government Pada Layanan Informasi Melalui Website Open Palement di Indonesian Parliamentary Center (IPC). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1966-1972.

Abstrak

Penerapan E-Government melalui website Open Parlement di Indonesia Parliamentary Center (IPC) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi dampak dan tantangan implementasi E-Government di IPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Open Parlement telah berhasil meningkatkan akses informasi, memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi melalui fitur forum diskusi dan pelaporan publik. Digitalisasi dokumen dan proses legislasi juga telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja parlemen. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui website ini telah memperkuat kepercayaan publik terhadap parlemen dan proses legislasi. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, tingkat literasi digital yang bervariasi di kalangan masyarakat, dan masalah keamanan data. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, perluasan program pelatihan literasi digital, dan pengembangan kebijakan keamanan data yang lebih ketat. Penerapan E-Government melalui website Open Parlement di IPC merupakan langkah penting dalam mendukung demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi secara efektif, IPC dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci : E- Government, Layanan Informasi, Website Open Parlement

Abstract

The implementation of E-Government through the Open Parliament website at the Indonesia Parliamentary Center (IPC) aims to increase transparency, accountability, and public participation in the legislative process. This study uses a qualitative descriptive approach to evaluate the impact and challenges of implementing E-Government at IPC. The results of the study indicate that the Open Parliament website has succeeded in increasing access to information, enabling more effective public oversight, and encouraging active public participation in the legislative process through discussion forum features and public reporting. The digitization of documents and legislative processes has also increased the efficiency and effectiveness of parliamentary work. In addition, increased transparency and accountability through this website have strengthened public trust in parliament and the legislative process. However, several challenges remain, including limited technological infrastructure in remote areas, varying levels of digital literacy among the community, and data security issues. Recommendations to address these challenges include increasing investment in technological infrastructure, expanding digital literacy training programs, and developing stricter data security policies. The implementation of E-Government through the Open Parliament website at IPC is an important step in supporting better democracy in Indonesia. By addressing existing challenges and utilizing technology effectively, IPC can continue to improve the quality of information services and strengthen the relationship between parliament and the public, thus creating a more transparent, accountable, and participatory government.

Key Words : E-Government, Information Services, Open Parliament Website

A. Pendahuluan

Pada era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-Government atau pemerintahan elektronik merupakan salah satu implementasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang pesat juga telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia kerja. Teknologi telah memudahkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang baru bagi perusahaan untuk dapat berkembang lebih cepat. Penerapan E-Government di berbagai negara telah menunjukkan potensi besar dalam memperbaiki layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Sudiantini et al., 2023)

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu berharap teknologi digital dapat mendorong transformasi yang lebih cepat lagi untuk perekonomian serta kehidupan bermasyarakat secara umum. (Lebang Guntur Christian 2023). Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan keragaman yang luas, menghadapi tantangan tersendiri dalam implementasi E-Government. Salah satu inisiatif penting dalam konteks ini adalah pengembangan website Open Parlement oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC). Website ini dirancang untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi terkait kegiatan parlemen, kinerja anggota parlemen, serta proses legislasi yang sedang berjalan.

Layanan informasi melalui website Open Parlement IPC diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dan akuntabilitas parlemen. Melalui platform ini, publik dapat mengakses berbagai dokumen legislasi, profil anggota parlemen, laporan rapat, serta forum diskusi untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka. Dengan demikian, website ini bukan hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi antara parlemen dan masyarakat.

Transparansi informasi publik merupakan salah satu cara terpenting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi. Penyebaran informasi berfungsi sebagai alat bagi masyarakat umum untuk memantau seluruh perkembangan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Definisi kebebasan informasi adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol semua langkah dan kebijakan yang diambil dari pejabat negara (Sasmita & Rahaju, 2023)

Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan organisasi masyarakat sipil atau non government organization (NGO), yang fokus pada penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan. IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. IPC didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. (Novandra et al., 2024).

Indonesia Parliamentary Center (IPC) didirikan sebagai sumber informasi utama bagi Parlemen Indonesia. Informasi tersebut berdasarkan temuan penelitian dan penasehat hukum mengenai desain sekolah, fungsinya, dan sistem yang mengaturnya. Penting untuk menyelenggarakan pertemuan yang efektif, representatif, dan akuntabel. Selain itu, IPC bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam proses politik.

IPC berasal dari program dialog yang didirikan oleh Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Pada tahun 2005, sejumlah besar kegiatan menjadikan IPC sebagai badan yang fokus pada isu-isu parlementer dan kemasyarakatan. Pada awal berdirinya, IPC menjalin hubungan dengan lembaga legislatif melalui program Parlemen Pemuda Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai provinsi untuk berpartisipasi dalam prosedur legislatif dan administrasi. Sebagai hasil dari pertumbuhannya, IPC telah menjadi advokasi bagi berbagai bidang. isu-isu mengenai tata kelola perusahaan dan banyak sektor. Sejak tahun 2017, IPC telah berkolaborasi dengan DPR untuk mengembangkan Parlemen Terbuka, sebuah inisiatif global yang menggabungkan parlemen dan masyarakat umum untuk menciptakan parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif. ¹ <https://ipc.or.id/>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam implementasi E-Government di Indonesia. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penerapan E-Government pada layanan informasi melalui website Open Parliament di Indonesia Parliamentary Center (IPC). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi, manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan E-Government di IPC.

C. Hasil dan Pembahasan

a) Penerapan E-Government

E-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan public yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. E- Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi. (Sumarna, 2024).

Pemanfaatan e-Government di Indonesia karena perubahan pada kehidupan bangsa dan negara secara fundamental, dari sistem pemerintahan otoriter dan sentral ke dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan menetapkan kewenangan pusat dan daerah otonom. (Tasyah et al., 2021)

Pelayanan e-Government bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada publik seperti program kerja, misi, layanan publik, serta koneksi ke seluruh

¹ <https://ipc.or.id/>

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan organisasi eksternal. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi pemerintahan dapat dilakukan secara efektif. Layanan berdasarkan publik pemerintahan memungkinkan warga negara untuk mengakses berbagai negara dari layananberbagai layanan tanpa harus secara fisik tanpakantor pemerintah harus secara fisik mengunjungi kantor pemerintah. Ketersediaan dan aksesibilitas informasi tentang E-Government memfasilitasi pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. E-Government juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik dan masyarakat. Berdasarkan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum dan Strategi Nasional E-Government, pemerintah harus mampu mengidentifikasi dua segmen masyarakat yang berbeda namun saling terkait, yaitu Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum dan Strategi Nasional E-Government, pemerintah harus mampu mengidentifikasi dua segmen masyarakat yang berbeda namun saling terkait (Suharyana, 2017) :

1. Masyarakat mengupayakan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhannya di seluruh Indonesia, transparan, dan mudah diakses melalui sarana interaktif.
2. Masyarakat berupaya mewujudkan impiannya, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog masyarakat pada saat pemilu.

Secara tegas, Inpres no 3 tahun 2003 dalam merumuskan bahwa tujuan pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. :

1. Membangun jaringan informasi dan transaksi publik yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia setiap saat, tanpa biaya dan tanpa penundaan dan jaringan transaksi yang berkualitas tinggi dan dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia setiap saat, tanpa biaya atau penundaan.
2. Membangun koneksi aktif hubungan dengan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan ketahanan terhadap perdagangan dan perubahan global. Dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan ketahanan terhadap perdagangan global mengubah.
3. Membangun saluran komunikasi nasional dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nasional .saluran dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam tata kelola nasional.
4. Menetapkan proses kerja dan sistem manajemen yang efisien dan transparan untuk meningkatkan transaksi dan layanan lintas batas antara badan pemerintah nasional dan daerah. Proses dan sistem manajemen untuk meningkatkan transaksi dan layanan lintas batas antara badan pemerintah nasional dan daerah.

b) Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas menurut Stanbury (2003) dalam (Putut Tri H, Rafiansyah, Rosyaulia & iti aisyah, 2022) yaitu bentuk kewajiban untuk mempertanggung jawabkan atas kegagalan atau keberhasilan dari pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.akuntabilitas dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mengawasi seluruh aspek pekerjaan, baik berhasil atau tidak, dalam rangka menjalankan misi dan tujuan organisasi. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media dan secara berkala. Dengan akuntabilitas, masyarakat mempunyai kemampuan untuk memahami kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak yang dipercayanya. Media pertanggungjawaban tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga memudahkan pihak yang berwenang memperoleh informasi, baik tertulis maupun lisan. Oleh karena itu, akuntabilitas akan menjadi lebih penting dalam dunia yang menghargai kepercayaan sebagai faktor terpenting, serta dalam masyarakat yang transparan, demokratis, dan bebas bias dalam memperoleh informasi. (Putut Tri H, Rafiansyah, Rosyaulia & iti aisyah, 2022)

c) Website Open Parlement

Situs online parlemen merupakan salah satu layanan e-parlemen yang sangat disediakan oleh masyarakat untuk menunjang kinerja. situs web telah menjadi komponen utama dalam arsitektur informasi, pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan publik dengan parlemen (Inter-Parliamentary Union, 2021).

Sumber informasi elektronik tentang kegiatan dan prosedur legislatif. Publik tidak dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai ketentuan perdebatan, mereka akan tetap percaya bahwa perdebatan tersebut tidak transparan, yang dapat meningkatkan skeptisisme publik terhadap pemerintah dari hal ini penting bagi tim untuk meningkatkan desain dan fungsionalitas situs web sehingga dapat diakses dan digunakan dengan lebih mudah (Febrina & Manurung, 2022).

Hal ini guna memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses yang luas terhadap informasi dari legislatif serta terciptanya mekanisme untuk partisipasi publik yang terbuka, sehingga hubungan antara parlemen dan masyarakat dapat terjaga. Terdapat beberapa prinsip di dalam penerapan open parliament (diantaranya ialah sebagai berikut (Rahman & Izzatussolekha, 2024):

1. Promosi budaya keterbukaan, yang di dalamnya meliputi domain mengenai hak masyarakat atas informasi legislatif, lalu ada domain mengenai pemerintah yang harus ikut serta dalam menerapkan upaya keterbukaan, selanjutnya domain mengenai internal parlemen itu sendiri yang ditunjukan dengan setiap kebijakan yang dicanangkan, dan terakhir berpartisipasi aktif di dalam pertukaran praktik baik di kancah global.
2. Membangun keterbukaan informasi parlemen, yaitu membentuk kebijakan penyebaran informasi secara proaktif meliputi kelembagaan, anggota parlemen, agenda, dokumen persidangan, anggaran, dan informasi mengenai persidangan sebelumnya.
3. Memudahkan akses informasi parlemen, yaitu meliputi penyediaan berbagai saluran akses bagi masyarakat terhadap informasi parlemen baik dalam bentuk fisik maupun media mainsteam.
4. Mengaktifkan komunikasi elektronik informasi parlemen, yaitu meliputi penyediaan akses teknologi informasi yang terbuka (e-parliament)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Government melalui website Open Parlement di IPC telah memberikan dampak positif dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif ini.

a) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Website Open Parlement telah berhasil menyediakan akses informasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan teori transparansi pemerintah yang menyatakan bahwa akses terbuka terhadap informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pejabat publik. Peningkatan jumlah laporan kinerja dan dokumen legislasi yang dipublikasikan mencerminkan komitmen IPC dalam mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

b) Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Fitur forum diskusi dan pelaporan publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi. Hal ini mendukung teori partisipasi publik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkaya proses legislasi tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil keputusan.

c) Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun hasil penelitian menunjukkan berbagai manfaat, tantangan terkait infrastruktur teknologi, literasi digital, dan keamanan data masih perlu diatasi. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata.
2. Peningkatan Literasi Digital: Program pelatihan dan edukasi mengenai literasi digital perlu diperluas untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.
3. Keamanan Data: IPC perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan data yang lebih ketat untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah potensi kebocoran data.

Penerapan E-Government melalui website Open Parlement di IPC telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif ini, tantangan terkait infrastruktur teknologi, literasi digital, dan keamanan data perlu segera diatasi. Dengan

mengimplementasikan rekomendasi yang telah disebutkan, diharapkan IPC dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat.

D. Kesimpulan

Penerapan E-Government melalui website Open Parlement di Indonesia Parliamentary Center (IPC) telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan dan partisipasi publik. Website Open Parlement menyediakan akses mudah dan terbuka ke berbagai dokumen legislasi, laporan kinerja, dan informasi terkait parlemen. Hal ini meningkatkan keterbukaan dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja parlemen. Publikasi laporan kinerja secara rutin dan fitur pelaporan publik memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik langsung kepada parlemen, mendorong anggota parlemen untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Fitur forum diskusi dan pelaporan publik di website memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Ini memperkaya proses legislasi dengan perspektif yang lebih beragam dan menciptakan mekanisme komunikasi dua arah antara parlemen dan masyarakat. Digitalisasi dokumen dan proses legislasi melalui website menghemat waktu dan biaya, serta mempercepat proses pengambilan keputusan di parlemen, memungkinkan anggota parlemen mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah.

Transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan melalui website Open Parlement meningkatkan kepercayaan publik terhadap parlemen dan proses legislasi. Masyarakat merasa lebih percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Selain itu, implementasi E-Government mendorong peningkatan kapasitas teknologi di lembaga parlemen dan adopsi teknologi informasi yang lebih luas. Program pelatihan dan edukasi juga membantu meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan staf parlemen.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif E-Government ini, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan, seperti peningkatan infrastruktur teknologi dengan investasi lebih besar dalam pengembangan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata. Perluasan program pelatihan dan edukasi mengenai literasi digital juga penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Selain itu, pengembangan dan penerapan kebijakan keamanan data yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah potensi kebocoran data.

Secara keseluruhan, penerapan E-Government melalui website Open Parlement di IPC merupakan langkah penting dalam mendukung demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi secara efektif, IPC dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan memperkuat hubungan antara parlemen dan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

E. Referensi

- Febrina, S., & Manurung, L. (2022). Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>
- Novandra, T. Y., Handayani, N., & Azizah, E. N. (2024). Peran Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam Mendorong Transparansi Legislasi di DPR-RI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 18065–18071. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14972%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/14972/11392>
- Putut Tri H, Rafiansyah, Rosyaulia, S., & iti aisyah, tommy satrio. (2022). Hubungan Akuntabilitas Dan Transparansi Sektor Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Pemerintahan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...*, 1(8), 2575–2579. <http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/601%0Ahttp://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/601/500>
- Rahman, A. D., & Izzatussolekha. (2024). *PENERAPAN KONSEP OPEN PARLIAMENT DALAM MEWUJUDKAN PARLEMEN YANG MODERN: STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT*

- REPUBLIK INDONESIA Azlan Dwi Rahman, Izzatussolekha. *XXI*(1), 19–28.
- Sasmita, A. N., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Publika*, 1723–1734. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1723-1734>
- Sudiantini, D., Naiwasha, A., Izzati, A., Ayunia, A., Putri, B., & Rindiani, C. (2023). Penggunaan Teknologi Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Dalam Era Digital Sekarang. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 262–269. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1082>
- Suharyana, Y. (2017). Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.5>
- Sumarna, A. (2024). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(2), 936–944.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>.